

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan wilayah yang eksotis. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, juga berada di cincin api (*the ring of fire*) di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi rentan terhadap bencana alam. Begitu juga dengan letak Indonesia yang berada pada lintang rendah dan daerah dengan iklim tropika basah, serta dihuni oleh berbagai ras dan suku bangsa dengan karakter yang tentunya berbeda-beda, maka selain bencana alam, Indonesia juga rentan dengan bencana sosial (Humaedi 2016 dalam Juhaina dan Ade Ikhsan 2019).

Eskalasi bencana alam Indonesia semakin meningkat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam yang cukup sering menimpa berbagai wilayah Indonesia tersebut berupa banjir, tanah longsor, angin ribut, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, badai, kebakaran hutan. Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tentunya memberikan dampak yang negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial manusia yang mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari kesehatan, sosial ekonomi, bahkan pendidikan pun ikut terganggu. Datangnya bencana alam pada dasarnya memang tidak bisa diprediksi dan dihindari oleh manusia, namun setidaknya kita bisa bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan menanggulangnya serta meminimalisir dampak negatif dari bencana itu sendiri.

Bencana alam tanah longsor merupakan salah satu dari sekian banyak bencana yang acap kali terjadi di Indonesia, terutama jika musim hujan tiba.

Tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak cukup besar untuk masyarakat. Bencana tanah longsor tidak hanya menimbulkan korban jiwa, akan tetapi juga menimbulkan kerugian material yang besar, dampak tersebut diantaranya: rusaknya lahan pertanian, kawasan pemukiman sarana infrastruktur lainnya (Priyono dkk 2006 dalam Nia 2016).

Bencana alam tanah longsor pada tanggal 1 April 2017 yang menimpa warga Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menyebabkan 28 warga menghilang (beberapa sudah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa), 17 orang mengalami luka-luka, 200 warga terpaksa diungsikan karena dan 32 rumah warga tertimbun material tanah longsor (Radar Ponorogo 3 April 2017). Menurut penuturan dari Pak Sarnu selaku Kepala Desa Banaran, jumlah korban yang meninggal ada 28 orang, 7 dari 28 orang yang hilang sudah ditemukan dan sisanya belum ditemukan. Setelah berlangsung 7 hari masa pencarian pasca terjadinya bencana, hanya 4 orang yang ditemukan dan 3 sisanya ditemukan pasca longsor susulan terjadi.

BPBD ponorogo menyebutkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sudah ada retakan sekitar 30 cm di bagian atas bukit (Data BPBD Ponorogo 2017). Kemudian disusul retakan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2017 dimana panjang retakan menjadi 15 m. Kemudian yang terakhir terjadi retakan pada tanggal 30 Maret 2017, hingga retakan bertambah menjadi 20 m akibat hujan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Disebutkan bahwa sejak 26 Maret 2017 warga sudah mulai mengungsi ketika retakan mencapai 15 m. Saat malam hari warga mengungsi ke lokasi pengungsian, dan di pagi harinya warga kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing untuk melakukan aktifitas seperti biasa, seperti memasak, membersihkan rumah, memberi makan ternak, mengolah lahan dan sebagainya. Saat terjadinya peristiwa bencana tanah longsor itu ada sebagian warga yang tengah memanen jahe di lahan mereka yang letaknya dibawah bukit yang menjadi pusat longsor.

Wilayah kabupaten Ponorogo yang secara geografis dikelilingi oleh pegunungan di sisi selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, di sisi

timur berbatasan dengan kabupaten Trenggalek, di sisi utara berbatasan dengan kabupaten Madiun, dan di sisi barat berbatasan dengan kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Menurut BPBD Jawa Timur, kabupaten Ponorogo merupakan 1 dari 29 kabupaten/kota di Jatim yang rawan akan terjadinya bencana alam, terutama tanah longsor.

Seperti keterangan yang diberikan oleh Pak Sarnu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di desa Banaran. Disebutkan bahwa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tanah longsor adalah akumulasi hujan yang terjadi beberapa hari sebelum peristiwa tanah longsor. Namun di sisi lain sistem drainase ladang yang kurang baik juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tanah longsor itu terjadi. Area hutan yang gundul merupakan faktor pendukung terjadinya longsor, namun tanah milik warga sebenarnya sudah ditanami pohon-pohon yang cukup besar sedangkan di sektor atas milik Perhutani banyak pohon yang sudah ditebang.

Pada dasarnya telah diketahui bahwa peristiwa pergerakan massa tanah, batuan ataupun kombinasinya, adalah suatu peristiwa yang kerap kali terjadi pada bentuk muka bumi yang berlereng dan kondisi tanah yang berada di kemiringan tertentu. Fenomena yang biasa dikenal dengan istilah tanah longsor ini terjadi akibat alam yang selalu mencari keseimbangan baru sebagai akibat dari adanya gangguan dan perubahan yang dikatakan sebagai penyebab timbulnya pengurangan kuat geser dan meningkatnya tegangan geser tanah (Kuswaji 2008 dalam Bukhori 2020).

Bencana tanah longsor termasuk bencana hidrometeorologi yang biasa terjadi di berbagai wilayah sepanjang tahun di Indonesia, yang mana pada setiap tahunnya mengalami eskalasi. (Bencana Longsor 2017 dalam Wanda 2018). Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengan cuaca ekstrem yang terjadi berupa curah hujan yang tinggi (Ferdiansyah 2002 dalam Pande 2014) selain dari beberapa faktor lain seperti sifat fisis permukaan tanah, serta sistem drainase dan keadaan tanah (Dayantolis dan Hariadi, 2006 dalam Pande 2014). Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berhubungan dengan iklim.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwasanya bencana hidrometeorologi diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban temperatur dan angin(Wanda, 2018). Yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi antara lain: banjir, badai, bencana kekeringan, kebakaran hutan, badai El Nino, badai La Nina, tanah longsor, tornado, angin putting beliung, angin topan, gelombang dingin, gelombang panas serta angin fohn 9 angin brubu, angin gending, angin kumbang dan angin bohorok).

Pemicu utama terjadinya bencana hidrometeorologi adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seperti yang dituturkan oleh Pak Sarnu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Andi Eka Sakya juga menjelaskan bahwa bencana tanah longsor berkaitan erat dengan intensitas curah hujan yang tinggi akibat cuaca yang eskترم, selain itu faktor lingkungan seperti sungai atau drainase yang buruk, penggundulan hutan dan faktor lainnya.

Tanah longsor merupakan proses perpindahan massa tanah (batuan) yang diakibatkan oleh gaya gravitasi (BPBD 2017,dalam Wanda 2018). Ketidakseimbangan pada gaya penahan dan gaya peluncur pada lereng itulah yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri berat beban mekanik (Wanda, 2018). Adanya gaya dari luar lereng yang berakibat pada besarnya gaya peluncur pada suatu lereng lebih besar daripada penahannya, sehingga massa tanah bergerak turun yang menyebabkan ketidakseimbangan gaya peluncur. Hal ini dipercepat dengan adanya pemicu berupa munculnya degradasi lahan akibat perubahan tata guna lahan yang tidak memperhatikan fungsi lahan dalam kawasan (BPBD 2017 dalam Wanda 2018).

Bencana alam tanah longsor yang terjadi pada tanggal 1 April 2017 di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial terutama perubahan sosial yang sifatnya regress (menyebabkan kemunduran). Kerugian yang harus ditanggung para korban sudah tidak terhitung jumlahnya, baik itu kerugian yang bersifat materiil maupun non

materiil. Angka kerugian yang ditanggung para korban sudah tidak terhitung jumlahnya baik kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil.

Untuk penanggulangan pasca bencana longsor Banaran diperlukan upaya keras yang terkoordinasi dengan baik. Pemerintah pun melakukan koordinasi yang baik dalam upaya penanggulangan musibah longsor tersebut. Warga yang menjadi korban tanah longsor Banaran tentunya membutuhkan perhatian yang serius untuk penanggulangan dan rehabilitasi pasca bencana longsor terjadi. Sehingga masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana longsor bisa secepatnya menjalani kehidupannya dengan normal.

Kerusakan akibat bencana longsor juga cukup terlihat di sektor perumahan, dimana 200 warga terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Namun kerusakan yang tidak kalah penting adalah kerusakan di sektor produktif. Sektor produktif yang mengalami kerusakan seperti infrastruktur, sektor sosial, dan sektor produksi (lahan pertanian/perkebunan). Kerusakan di sektor produktif ini menjadi amat penting untuk di perhitungkan karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat serta potensi pengembangan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana longsor Banaran terbilang cukup baik. Adanya koordinasi yang baik antara Gubernur Jawa Timur dengan berbagai instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah Kabupaten, TNI, Polri dan relawan maupun lembaga swasta membuat upaya rehabilitasi berjalan dengan baik.

Di dalam siklus manajemen bencana terdapat empat fase yang harus dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain diantaranya fase mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan dan pembangunan kembali. Fase pemulihan dan pembangunan kembali (*recovery and reconstruction*), merupakan fase di dalam tahapan manajemen bencana yang mempunyai kesempatan lebih besar dan signifikan dalam mengurangi resiko bencana serta bisa berpengaruh terhadap peningkatan adaptasi bencana (Usamah dan Haynes, 2011 dalam Fanni 2014). Relokasi atau pemukiman kembali pasca bencana, dimana pemukiman yang mengalami kerusakan

akibat bencana dibangun kembali di tempat yang berbeda maupun di tempat yang sama agar terhindar dari bencana. Relokasi adalah salah satu langkah yang sering dilakukan dalam tahap rekonstruksi. Relokasi yang terjadi karena lokasi sebelumnya merupakan daerah bencana alam disebut juga sebagai relokasi korban bencana dimana relokasi dilakukan secara permanen maupun sementara. Relokasi masyarakat korban bencana itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah guna melindungi masyarakat dari ancaman bahaya bencana alam, bahkan menjadi solusi yang cukup populer dalam pengelolaan bencana (Whiteford dan Tobin, 2004 dalam Fanni 2014).

Relokasi sering dilakukan sebagai tindakan untuk menghadapi fase *recovery* atau rekonstruksi. Relokasi yang sifatnya hanya sementara dalam fase *recovery* hanya menunda dan memperpanjang fase pemulihan (Quarantelli, 1999b dalam Fanni 2014). Relokasi permanen dinilai jauh lebih baik dari relokasi sementara jika bencana terus menerus terjadi. Meskipun relokasi dapat mengurangi resiko terhadap ancaman bencana alam, tetapi dalam beberapa kasus juga meningkatkan kerentanan (*vulnerability*) terutama dalam aspek mata pencaharian, sosial budaya, dan politik (Usamah dan Haynes, 2011 dalam Fanni 2014).

Relokasi bukan sekedar perkara memindahkan individu tetapi meliputi keluarga, desa, dan masyarakatnya sehingga pemerintah dirasa perlu juga untuk memindahkan seluruh aspek kehidupannya. Yang harus dipindahkan bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga tempat bekerja, tempat bermain, tempat beribadah dan tempat-tempat lainnya yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat (Quarantelli, 1999a dalam Fanni 2014).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses relokasi permukiman yang terdampak bencana, adalah sebagai berikut (Usamah dan Haynes, 2011; Dikmen, 2006; Ozden, 2006 dalam Fanni 2014):

1. Aspek sosial dan budaya, yang meliputi hubungan sosial dengan keluarga, kerabat, ketersediaan tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi dan fasilitas lain seperti di lingkungan tempat tinggal yang lama, serta jaminan akan status kepemilikan lahan dan bangunan.

2. Aspek ekonomi, meliputi jarak anatar tempat tinggal dengan tempat bekerja, jaminan terhadap pekerjaan atau mata pencaharian, serta penggantian aset lahan dan bangunan.
3. Aspek fisik dan lingkungan, yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan sarana prasarana lingkungan maupun kondisi geografis lingkungan tempat tinggal baru.
4. Aspek kualitas konstruksi bangunan, meliputi bahan bangunan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal baru, sistem instalasi di dalam bangunan rumah, pemilihan lokasi tempat tinggal yang baru, dan perencanaan desain permukiman baru.
5. Aspek proses pengambilan keputusan, dalam hal ini tentunya melibatkan partisipasi masyarakat serta *stakeholder* lain yang berkepentingan seta proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

Seperti yang dilansir oleh Republika.ID bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan akan merelokasi seluruh warga Desa Banaran yang menjadi korban langsung maupun terdampak bencana longsor ke lahan yang aman untuk tempat mukim. Ada dua pendekatan relokasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu relokasi mandiri dan bantuan penuh pemerintah. Relokasi mandiri artinya warga memutuskan relokasi tempat tinggalnya di lahan mereka sendiri karena mereka punya ladang. Sementara alternatif relokasi batuan penuh pemerintah daerah dilakukan dengan menyediakan lahan dan membangun rumah layak huni. Kedua sistem relokasi yang di tetapkan pemerintah ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah karena masyarakat yang menjadi korban bencana longsor menolak untuk di relokasi secara permanen ke luar desa Banaran, selain itu masyarakat juga menolak untuk trasnmigrasi ke luar pulau Jawa, padahal menurut pemerintah sendiri transmigrasi merupakan relokasi yang paling ideal untuk diterapkan.

Keberhasilan pemerintah dalam merelokasi pemukiman warga tentunya menjadi tidak mudah dilakukan karena harus menyelaraskan persepsi dan preferensi warga dalam bermukim. Pasca bencana terjadi

banyak sekali ditemukan pro dan kontra mengenai kebijakan relokasi dalam masyarakat korban bencana (Stenfrey Loy Pandia; dkk, 2016). Faktor yang terkait adanya perbedaan respon masyarakat korban bencana terhadap kebijakan relokasi antara lain proses penyebaran informasi, komunikasi, tingkat pendidikan, hubungan sosial masyarakat yang terjalin, serta cara mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah (Fanni Harliani, 2014). Respon masyarakat yang terdampak bencana terhadap kebijakan relokasi pemukiman menjadi hal penting, selain dari aspek fisik lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, hal ini terkait dengan pengembangan wilayah di lokasi hunian baru pasca bencana.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan sosial untuk senantiasa hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam diri setiap manusia terdapat naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri ini disebut *gregariousness*. Manusia disebut juga sebagai sosial animal atau hewan sosial. Karena sejak seorang individu itu dilahirkan, maka dia telah memiliki keinginan pokok, yaitu menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya (Soekanto, 2007 dalam Durotus 2016).

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang homogen. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial yang dilakukan sudah saling mengenal antara orang yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat desa yang identik dengan kesederhanaan masih menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan masih kental, hal ini menandakan bahwa dalam masyarakat pedesaan mempunyai keterikatan sosial yang tinggi. Masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi akan lebih mudah untuk bekerjasama karena adanya sikap saling membantu dan saling percaya.

Dalam upaya mitigasi hingga penanggulangan bencana modal sosial masyarakat turut berkontribusi (Wardyaningrum, 2016). Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bencana banjir mampu menciptakan

solidaritas sosial. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa bencana banjir yang terjadi mampu membangun solidaritas sosial masyarakat pluralis di Desa Bojongloa sudah terjalin dengan baik sehingga menciptakan kerukunan sosial masyarakat yang berkesinambungan (Irvani, 2018). Lebih lanjut penelitian lain di Lombok pasca gempa bumi Juli 2018 juga menunjukkan hal yang sama, bahwa terdapat implementasi solidaritas sosial pasca gempa dalam budaya *besiru* yakni merupakan tindakan menolong orang lain oleh masyarakat Desa Sembalun Bumbung yang membantu masyarakat Kabupaten Lombok Utara dengan mengirimkan sayuran dan buah-buahan hasil panen mereka, bahkan uang dari penjualan hasil panen mereka juga digunakan untuk membantu masyarakat korban gempa di Palu (Fatmahandayani, 2019).

Banyak ditemui studi-studi yang mempelajari mengenai solidaritas sosial. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh HS Durotus Sa'diyah mengenai "Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta (Studi Kasus Komunitas Paguyuban Pengusaha Warga Kuningan)". Dalam studi tersebut disebutkan bahwa sebagai masyarakat sekitar yang sama-sama mencari nafkah merupakan individu yang menjadi bagian dari masyarakat Kuningan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa ketergantungan dimana setiap manusia tidak dapat hidup sendiri antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut terjadi karena manusia saling mengenal, membantu, dan bertukar pengalaman, serta memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing dalam hidup bersama. Masyarakat Kuningan mempunyai suatu alat dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam kesehariannya, yaitu melakukan gotong royong serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi antar sesama (Durotus, 2016).

Dalam studi ini penulis ingin mengetahui bagaimana keterikatan sosial pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Kabupaten Ponorogo terkait dengan respon mereka terhadap kebijakan relokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta bagaimana solidaritas

sosial pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Ponorogo.

1.2 FOKUS PENELITIAN :

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan mengenai fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti berdasarkan gambaran umum yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu mengenai keterikatan sosial masyarakat dilihat dari respon mereka terhadap kebijakan relokasi yang telah ditetapkan pemerintah serta solidaritas sosial yang ada di masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Ponorogo. Dalam fokus penelitian ini meliputi beberapa isu yang peneliti ingin teliti antara lain mengenai alasan mengapa masyarakat menolak untuk di relokasi keluar desa Banaran, dan bagaimana solidaritas sosial yang ada pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran.

Dari fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Ponorogo terhadap kebijakan relokasi yang ditetapkan pemerintah ?
2. Bagaimana solidaritas sosial yang ada pada masyarakat korban bencana tanah longsor Banaran Ponorogo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui respon masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Ponorogo terhadap kebijakan relokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterikatan sosial pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor di desa Banaran Ponorogo.

3. Untuk mengetahui solidaritas sosial yang ada di masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan disiplin ilmu secara teori maupun praktek dalam penelitian.
- b. Untuk mengetahui dunia penelitian sesuai dengan ilmu yang telah di peroleh selama dalam perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan untuk pengembangan ilmu Sosiologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai keterikatan dan solidaritas sosial pada masyarakat korban bencana tanah longsor Banaran Ponorogo.
- b. Mengetahui gambaran kehidupan masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran Ponorogo.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Studi Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi-studi terdahulu sebagai referensi yang berkaitan dengan solidaritas dan respon masyarakat terhadap relokasi antara lain :

1. Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh Nia Damayanti (2014) mengenai Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif tentang respon Pedagang terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Kenjeran ke Pasar Sentra Ikan Bulak. Dalam studi tersebut memberikan hasil analisa yang menyebutkan bahwa para pedagang kaki lima mengetahui kalau ternyata tempat berdagang

yang dahulu merupakan tempat ilegal sehingga pemerintah kota Surabaya akan merelokasi pedagang ke tempat yang lebih baik dan tidak menggunakan lahan atau fasilitas umum. Inovasi yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk PKL agar proses jual beli berjalan dengan aman, nyaman, bersih serta tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Pasar Sentra Ikan Bulak ini dibangun di wilayah permukiman warga yang lokasinya pun tidak jauh dari tempat wisata Pantai Ria Kenjeran. Kebijakan relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini mendapat berbagai respon dari PK, ada yang menerima kebijakan dan ada pula yang menolak kebijakan tersebut. Pedagang yang menolak untuk di relokasi ini punya alasan bahwa fasilitas yang ada masih kurang dari jumlah pedagang kaki lima yang ada jadi tidak semua pedagang bisa menikmati fasilitas tersebut.

2. Studi yang dilakukan oleh Ardiyanto (2017) tentang Relokasi Masyarakat Rawan Bencana (Studi Tahap Relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul). Hasil penelitian dalam studi tersebut menyebutkan bahwa lancarnya proses relokasi terjadi karena sejak awal dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat, berupa musyarah mufakat warga/masyarakat. Semua keinginan dan keluhan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dalam tahapan partisipasi tersebut. Dalam proses relokasi yang dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu dimulai dengan musyawarah, pemilihan lokasi aman dari bencana, pembuatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat (tempat tinggal dan makanan), serta rehabilitasi kondisi sosial ekonomi melalui kelompok ternak, kelompok air dan kelompok tani. Yang menjadi tantangan terbesar dalam proses relokasi adalah pengorganisasian masyarakat yang melibatkan kepentingan dan keinginan masyarakat yang beragam (baik itu kepentingan kelompok maupun individu) pasca bencana,

pembenahan infrastruktur sampai pada pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, relokasi membawa dampak yang baik terhadap meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan pada aspek sosial, relokasi dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi sosial dan cenderung mengalami peningkatan.

3. Kemudian studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Elly Kustiana, Iwan Alim Saputra (2020) tentang *Community Response to Statement Relocation After Liquefaction in Petobo Village*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 25 (83,33%) responden mengetahui dan 30 (100%) menyatakan setuju dengan adanya rencana relokasi pemukiman pasca terjadinya bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan. Akan tetapi 28 (98,33%) responden menyatakan menolak dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang akan memindahkan permukiman ke kelurahan lain. Masyarakat korban bencana tersebut umumnya tetap berharap untuk segera dilakukan relokasi dan tetap di laksanakan di Kelurahan Petobo karena mereka adalah penduduk asli yang sudah lama mendiami wilayah Petobo.
4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Lubabun Ni'am (2014) tentang *Kepengaturan dan Penolakan Relokasi Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa warga Watugajah menolak skema relokasi. Penolakan warga Watugajah terhadap kebijakan relokasi bukanlah bentuk antipati terhadap otoritas kepengaturan. Warga justru menunjukkan gabungan antara sikap mempertahankan diri untuk kehidupan yang lebih baik menurut mereka, sekaligus bersikap taktis atas adanya program, bantuan, maupun kebijakan dari berbagai pihak.

5. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh HS Durotus Sa'diyah mengenai “Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta (Studi Kasus Komunitas Paguyuban Pengusaha Warga Kuningan). Dalam studi tersebut disebutkan bahwa sebagai masyarakat sekitar yang sama-sama mencari nafkah merupakan individu yang menjadi bagian dari masyarakat Kuningan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa ketergantungan dimana setiap manusia tidak dapat hidup sendiri antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut terjadi karena manusia saling mengenal, membantu, dan bertukar pengalaman, serta memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing dalaam hidup bersama. Masyarakat Kuningan mempunyai suatu alat dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam kesehariannya, yaitu melakukan gotong royong serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi antar sesama (Durotus, 2016).

Tabel 1.1
Matriks Studi Terdahulu

N	Peneliti	Judul	Temuan
1.	Nia Damayanti	Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif tentang respon Pedagang terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Kenjeran ke Pasar Sentra Ikan Bulak	Kebijakan relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini mendapat berbagai respon dari PK, ada yang menerima kebijakan dan ada pula yang menolak kebijakan tersebut. Pedagang yang

			menolak untuk di relokasi ini punya alasan bahwa fasilitas yang ada masih kurang dari jumlah pedagang kaki lima yang ada jadi tidak semua pedagang bisa menikmati fasilitas tersebut.
2.	Ardiyanto	Relokasi Masyarakat Rawan Bencana (Studi Tahap Relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul).	). Hasil penelitian dalam studi tersebut menyebutkan bahwa lancarnya proses relokasi terjadi karena sejak awal dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat, berupa musyarahah mufakat warga/ masyarakat. Semua keinginan dan keluhan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dalam tahapan partisipasi tersebut. Dalam proses relokasi yang dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu dimulai dengan

			musyawarah, pemilihan lokasi aman dari bencana, pembuatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat (tempat tinggal dan makanan), serta rehabilitasi kondisi sosial ekonomi melalui keompok ternak, kelompok air dan kelompok tani.
3.	Elly Kustiana, Iwan Alim Saputra	Community Response to Statement Relocation After Liquefaction in Petobo Village	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 25 (83,33%) responden mengetahui dan 30 (100%) menyatakan setuju dengan adanya rencana relokasi pemukiman pasca terjadinya bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan. Akan tetapi 28 (98,33%) responden menyatakan menolak dan tidak setuju dengan kebijakan

			pemerintah yang akan memindahkan permukiman ke kelurahan lain.
4	Lubabun Ni'am	Kepengaturan dan Penolakan Relokasi Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi	warga Watugajah menolak skema relokasi. Penolakan warga Watugajah terhadap kebijakan relokasi bukanlah bentuk antipati terhadap otoritas kepengaturan. Warga justru menunjukkan gabungan antara sikap mempertahankan diri untuk kehidupan yang lebih baik menurut mereka, sekaligus bersikap taktis atas adanya program, bantuan, maupun kebijakan dari berbagai pihak.
	HS Sa'diah	Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta (Studi Kasus Komunitas Paguyuban Pengusaha Warga Kuningan)	Masyarakat Kuningan mempunyai suatu alat dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam kesehariannya, yaitu melakukan

			gotong royong serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi antar sesama (Durotus
--	--	--	---

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Teori Solidaritas Sosial – Emile Durkheim

Solidaritas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kelompok sosial sebab pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Konsep solidaritas sosial yang dikenal sebagai konsep sentral dari salah satu tokoh penting dalam Sosiologi yaitu Emile Durkheim. Solidaritas sosial menekankan pada hubungan antar individu dalam kelompok serta mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan yang didukung oleh nilai-nilai moral serta kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Wujud nyata dalam kehidupan bersama akan menciptakan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Durkheim yang secara politik ia merupakan seorang yang liberal, tetapi secara intelektual tergolong lebih konservatif. Seperti halnya Auguste Comte dan orang Katolik yang menentang Revolusi Perancis, ia cemas dan begitu membenci kekacauan sosial. Karya-karya besar Durkheim banyak mendapat inspirasi dari kekacauan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial besar seperti Revolusi Perancis dan oleh perubahan sosial lain (seperti pemogokan buruh industri, perpecahan negara-gereja, kekacauan kelas penguasa, dan kebangkitan politik antisemitisme) yang menonjol di Perancis di masa hidup Durkheim (Karady, 1983 dalam Bryan 2014).

Dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim membedakan antara dua tipe fakta sosial yaitu material dan nonmaterial. Meskipun Durkheim membahas keduanya dalam karyanya, akan tetapi perhatian utamanya lebih tertuju pada *fakta sosial material* (seperti kultur dan institusi sosial) daripada *fakta sosial material* (birokrasi dan hukum).

Perhatian Durkheim terhadap fakta sosial non material ini terbukti jelas dalam karyanya yang paling awal, *The Division of Labor in Society* (1893 / 1964). Dalam buku ini perhatian Durkheim tertuju pada upaya untuk membuat analisis komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat berada dalam keadaan primitif atau modern. Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat primitif itu dipersatukan oleh fakta sosial nonmaterial, terutama oleh ikatan moralitas bersama, atau oleh apa yang ia sebut sebagai *kesadaran kolektif* yang kuat. Tetapi, karena kompleksitas masyarakat modern, kekuatan kesadaran kolektif yang ada di masyarakat telah menurun. Yang menjadi ikatan utama dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang ruwet, dimana hal itu membuat individu terikat satu sama lain dalam hubungan yang saling tergantung. Menurut Durkheim, pembagian kerja dalam masyarakat modern menimbulkan beberapa patologi (*pathologies*). Dengan kata lain, divisi kerja bukan metode yang memadai yang dapat membantu masyarakat. Kecenderungan Durkheim pada sosiologi konservatif sudah mulai terlihat ketika ia menganggap bahwa revolusi tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Durkheim menyatakan bahwa berbagai reformasi dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar tetap berfungsi. Meski ia mengakui bahwa tak mungkin kembali ke masa lalu di mana kesadaran kolektif masih menonjol, akan tetapi ia beranggapan bahwa dalam masyarakat modern moralitas bersama dapat diperkuat dan karena itu manusia akan dapat menganggulangi penyakit sosial yang dialami dengan cara baik (Ritzer dan Douglas, 2007).

Dalam karya Durkheim yang berjudul *Division of Labor* menyatakan bahwa unsur yang baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas.

Durkheim membedakan antara masyarakat-masyarakat yang mempunyai ciri khas dari solidaritas mekanis dengan yang memiliki solidaritas organis. Masyarakat dengan solidaritas mekanis itu belum mempunyai pembagian kerja, selain itu masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan kesadaran yang sama pula. Masyarakat dengan solidaritas organis merupakan perkembangan lanjut dari masyarakat dengan solidaritas mekanis, yang mana dalam masyarakat dengan solidaritas organis telah memiliki pembagian kerja yang jelas yang ditandai dengan spesialisasi tertentu. Apabila solidaritas tersebut mengalami kemunduran maka mungkin akan timbul keadaan *anomie*, yang mana masyarakat tidak lagi mempunyai pedoman untuk mengukur kegiatan-kegiatannya dengan nilai dan norma yang ada (Soerjono, 2005).

Emile Durkheim yang merupakan profesor Sosiologi pertama dari Universitas Paris, mengambil pendekatan kolektivitas terhadap pemahaman mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas sosial dalam berbagai lapisan masyarakat pada hakekatnya bekerja seperti perekat sosial. Solidaritas sosial dalam hal ini dapat berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh individu-individu yang ada dalam sebuah ikatan kolektif pada masyarakat.

Solidaritas Mekanis

Dalam menganalisa masyarakat secara keseluruhan, Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis lebih menekankan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness*). Kesadaran kolektif (*collective consciousness*) menyadarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama. Solidaritas mekanis dibangun dari sesama manusia yang didasari akar-akar humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan sesama, dimana solidaritas tersebut mempunyai kekuatan yang besar dalam membangun kehidupan yang harmonis antar individu

dalam masyarakat. Maka dari itu, landasan solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer. Solidaritas mekanis merupakan sesuatu yang bergantung pada individu-individu yang mempunyai dan menganut kepercayaan maupun keyakinan yang sama dan pola norma yang sama pula. Hal tersebut yang membuat sifat individualitas kurang dan bahkan tidak berkembang, individual ini akan terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar untuk konformitas. Individu tidak harus mengalami atau melalui tekanan yang cenderung melumpuhkan, sebab kesadaran individu akan hal yang lain mungkin juga tidak berkembang. Inilah yang menjadi akar mudarnya atau deintegrasi nilai pada solidaritas mekanis. Pertama, sudah diketahui bahwa nilai barang bersifat ekonomis dimana semakin lama maka nilai barang juga akan menyusut. Kedua, sebenarnya kesadaran kolektif itu tidak *stagnan* atau tetap, melainkan bergerak liar dalam setiap tindakan masyarakat.

Solidaritas mekanis mempunyai indikator yang jelas yaitu ruang lingkup dan kerasnya nilai-nilai yang bersifat menekan (Durkheim, 1964 dalam Bryan 2014) (*represif*). Nilai-nilai ini men-justifikasi setiap perilaku individu sebagai sesuatu yang jahat, yang mana bisa mengancam atau melanggar kesadaran kolektif yang kuat tersebut. Sanksi pada pelaku kejahatan menunjukkan pelanggaran moral dari kelompok tersebut melawan ancaman atau penyimpangan yang demikian tersebut, sebab mereka dipandang sudah merusak keteraturan sosial. hukuman atau sanksi yang diberikan tidak harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang memojokkan masyarakat itu sendiri, juga bukan merupakan suatu pertimbangan yang diberikan untuk membuat hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan, sebaliknya ganjaran itu menggambarkan kemarahan kolektif yang muncul. Sebenarnya tidak terlalu banyak sifat orang yang menyimpang atau tindakan kejahatannya seperti penolakan terhadap kesadaran kolektif yang diperlihatkannya, akan tetapi perlu diketahui bahwa suatu sifat

kejahatan muncul dari umpan balik nilai-nilai masyarakat. Yang terpenting dari solidaritas mekanis adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam suatu kepercayaan, sentimen dan sebagainya. Homogenitas ini hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat minim (Doyle Paul Johnson, 1986 dalam Bryan 2014).

Solidaritas Organik

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang jelas dan bertambah besar. Solidaritas organik didasarkan pada tingkat rasa saling ketergantungan yang tinggi. Bertambahnya rasa saling ketergantungan itu disebabkan oleh bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan juga menggalakkan bertambahnya perbedaan pada kalangan individu dalam masyarakat. Munculnya perbedaan-perbedaan merombak kesadaran kolektif pada individu, yang pada saatnya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Durkheim mengatakan bahwa “itulah pembagian kerja yang terus saja mengambil peran yang tadinya diisi oleh kesadaran kolektif”. Durkheim menyebutkan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya undang-undang yang sifatnya memperbaiki, menyembuhkan maupun yang bersifat memulihkan (*restitutif*) daripada yang bersifat represif. Tujuan dari kedua bentuk undang-undang itu pun berbeda. Undang-undang represif cenderung lebih mengungkapkan kemarahan kolektif yang kuat, sedangkan undang-undang restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang terspesialisasi dalam kelompok-kelompok di masyarakat. Oleh sebab itu, sifat sanksi yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan berbeda dalam kedua undang-undang itu.

Mengenai tipe sanksi yang sifatnya restitutif Durkheim mengatakan “bukan bersifat balas dendam, melainkan hanya sekedar menyetel keadaan”. Berjalannya undang-undang represif sebenarnya bukan memperkuat keadaan karena sudah adanya investasi nilai tetapi represif sedikit demi sedikit akan menuju kepada undang-undang restitutif. Dalam sistem organis, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi sedikit sekali kemungkinannya, karena kesadaran kolektif yang tidak seberapa kuat. Sesebagai hasilnya, hukuman lebih bersifat rasional. Yang disesuaikan dengan rusaknya pelanggaran dan bermaksud untuk memulihkan atau melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan serta menjamin bertahannya kaidah ketergantungan yang kompleks tersebut dari solidaritas sosial.

Solidaritas bisa dikatakan juga sebagai kesetiakawanan antar individu dalam kelompok sosial. Tingginya solidaritas dalam suatu kelompok sosial tergantung pada kepercayaan masing-masing individu dan kemampuannya untuk melaksanakan peran dengan baik. Makin tinggi solidaritas suatu masyarakat maka makin tinggi pula *sense of belonging*. Dalam perspektif Sosiologi, keakraban hubungan antar kelompok masyarakat itu tidak hanya merupakan alat dalam rangka mencapai atau mewujudkan cita-citanya, akan tetapi justru keakraban hubungan sosial tersebut sekaligus merupakan salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat. Keadaan kelompok sosial yang semakin kokoh selanjutnya akan menimbulkan *sense of belongingness* antar individu di dalamnya (Sarah, 2015).

Solidaritas sosial melahirkan persamaan, saling ketergantungan, dan pengalaman yang sama merupakan unsur pengikat dalam unit-unit kolektif seperti keluarga, komunitas dan kelompok. Menurut Durkheim, berdasarkan hasilnya, solidaritas dibedakan menjadi dua yaitu solidaritas yang sifatnya positif dan solidaritas yang sifatnya negatif. Solidaritas negatif cenderung tidak menghasilkan integrasi apapun, selain itu juga tidak memiliki

kekhususan, sedangkan solidaritas positif dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri (Sarah, 20150).

1. Mengikat individu pada masyarakat secara langsung tanpa perantara. Individu juga merupakan bagian yang terbentuk dan memiliki ketergantungan pada masyarakat.
2. Solidaritas adalah suatu sistem fungsi yang berbeda dan sifatnya khusus, yang menyatukan hubungan-hubungan yang tetap, walaupun sebenarnya kedua masyarakat tersebut adalah satu saja.
3. Individu sebagai bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, akan tetapi masing-masing individu memiliki peran dan fungsi yang berbeda di dalam masyarakat, tetapi tetap dalam satu kesatuan sosial.

1.6.2 Sub Kultur *Peasant* Everett M. Rogers

Menurut Koentjaraningrat (1987 :41 dalam Wirawan 2006) mentalitas petani di Indonesia (tidak hanya di Jawa) memiliki nilai homogenitas yang tinggi dalam kehidupannya. Dalam rangka pemikiran ini, ada konsep penting yang ia katakan bahwa, di dunia ini pada khas hakekatnya manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan mereka punya ketergantungan satu sama lain dimana mereka selalu mendapatkan bantuan dari sesamanya disaat mengalami kesulitan. Konsep ini memberikan suatu landasan yang kokoh bagi rasa aman, tentram dalam hidup bersama itu dengan keharusan untuk saling memberi dan menjaga homogenitas**). Pada bagian lain Koentjaraningrat menyebutkan bahwa, mentalitas Priyayi Jawa memiliki persepsi waktu yang banyak ditentukan oleh masa lampau, hal itu tidak jauh berbeda dengan hakekat konsepsi Emile Durkheim tentang solidaritas mekanis dalam kehidupan masyarakat yang masih serba sederhana (Koentjaraningrat, 1984 dalam Wirawan 2006)

Berkaitan dengan persoalan ini, Everett M Rogers, menjelaskan bahwa, petani di pedesaan umumnya menganut sub kultur *peasant* yang khas. Dengan kata lain pendapat dari Evereet M Rogers ini cenderung melihat *peasant* itu bersifat kultural, dengan ciri-cirinya antara lain:

1. *mutual distrust in interpersonal relation* ,adanya ketidakpercayaan secara timbal balik dalam hubungan antara petani yang satu dengan yang lainnya. Adanya sikap yang saling tidak percaya terhadap satu sama lain, menurut pendapat dari Lopreato, Friedman (dalam E.M. Rogers, 1969) menyebutkan bahwa: “petani Italia selalu mencurigai motif-motif setiap orang dan bungkam serta bertahan seperti itu dengan cara yang nyaris bersifat pathologis”
2. *Perceived limited good*. Komunitas *peasant* mempunyai pandangan yang sempit sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu nampak terbatas dan umumnya selalu merasa kekurangan. Pandangan *peasant* mengenai terbatasnya segala sesuatu di dunia ini , baik yang bersifat fisik (tanah, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan) lebih jauh menyebabkan anggapan bahwa kuantitas hal-hal tersebut tidak bisa ditingkatkan. Seiring dengan pandangn ini kemudian muncul logika bahwa perbaikan bagi seorang individu hanya mungkin tercapai diatas pengorbanan orang lain.
3. *Dependence on and hostility toward government authority*, pada dasarnya mereka mempunyai ketergantungan dan rasa kecurigaan terhadap Pemerintah dan unsur-unsurnya. Sehubungan dengan sikap kontroversial *peasant* terhadap pemerintah (merasa tergantung dan cenderung bermusuhan dengan pemerintah) ada beberapa ilustrasi yang dapat dikemukakan. Lebih jauh E.M Rogers menjelaskan bahwa sikap *peasant* yang cenderung bermusuhan dengan pemerintah dan unsur-unsurnya ini berakar dari sejarah yang panjang dimana *peasant* mengalami eksploitasi

dan pengendalian oleh kekuatan-kekuatan luar-desa (pemerintah dan pedagang kota). Dalam kaitannya dengan sikap bermusuhan ini Levi (dalam E.M. Rogers, 1969) menggambarkan: “*bagi petani (didasarkan atas pengamatannya terhadap petani Italia), negara lebih jauh ketimbang surga, dan lebih jauh lagi ketimbang hantu...*”.

Sementara Bailey (dalam E.M. Rogers, 1969) menjelaskan dengan pendapat: “*apabila pemerintah dimisalkan kuda, maka semua adalah kuda Troyan*”. Akan tetapi disisi lain, *peasant* memiliki rasa ketergantungan terhadap pemerintah. Contoh yang bisa kita temui di masyarakat adalah terdapat kecenderungan pandangan di kalangan masyarakat bahwa pembangunan desa merupakan tugas pemerintah.

4. *Familism*, mereka mempunyai hubungan kekeluargaan yang tebal dan tingkat keakraban yang tinggi dalam hubungannya dengan orang yang punya ikatan kekerabatan. Familisme, yang menurut Everett M. Rogers juga menjadi elemen dalam subkultur *peasant*, diartikan sebagai: subordinasi dari tujuan-tujuan individu terhadap tujuan kelompok (keluarga). Adanya kecenderungan untuk tidak mempercayai satu sama lain di antara para *peasant* mengakibatkan ikatan keluarga semakin erat. Hal ini tentunya membuat keluarga memainkan peranan yang amat penting di kalangan *peasant*. Dalam lingkungan desa (*peasant*), ikatan-ikatan keluarga dan kekerabatan merupakan sebuah basis struktur untuk unit-unit sosial maupun politik yang ada dalam komunitas setempat.
5. *lack of innovativeness*, rendahnya tingkat inovasi *peasant*, menurut E.M. Rogers berkaitan dengan tiga hal. *Pertama*, masyarakat *peasant* memiliki pola hidup dimana mereka menggunakan cara-cara yang mereka tahu pasti akan menghasilkan sesuatu untuk mereka. Masyarakat *peasant* umumnya enggan

untuk menggunakan cara-cara baru yang mungkin saja bisa menimbulkan kegagalan. Mengenai hal ini, Strassman mengungkapkan: “*ikan hiu hanya berbahaya bagi mereka yang berenang*”. Maka dalam hal seorang *peasant* akan memilih untuk tidak “berenang”. *Kedua*, rendahnya tingkat inovasi di kalangan *peasant* merupakan akibat dari kelangkaan sumber-sumber ekonomi atau penerapan teknologi yang kurang tepat guna. Masyarakat *peasant* yang umumnya miskin tentu enggan untuk menerapkan ide-ide baru karena ini akan memerlukan biaya. *Ketiga*, kurangnya atau rendahnya pengetahuan *peasant* mengenai masalah-masalah teknis (*technical know how*) dan sumber daya, menjadi penyebab rendahnya derajat inovasi mereka.

6. *Fatalisme*. Sifat *fatalisme* yang melekat pada masyarakat *peasant* merupakan suatu derajat yang menunjukkan rendahnya kemampuan individu untuk mengendalikan masa depan mereka. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya fatalisme. *Pertama*, etos kepasifan yang terkait dengan kepercayaan (agama). Seperti yang diungkapkan oleh Fals Borda (dalam E.M. Rogers, 1969) bahwa “*gerak (dalam masyarakat peasant) hanya terjadi bila diciptakan oleh kekuatan dari luar, dan itupun diterima dengan sedikit atau bahkan tanpa reaksi*”. Landasan dogmatis dari etos kepasifan ini merupakan sebuah proyeksi dari ungkapan “*Tuhan memberi dan Tuhan mengambilnya lagi*”. *Kedua*, struktur keluarga yang otoritarian yang cenderung membentuk anak-anak yang bersifat pasif dan selalu tergantung pada orang lain. Pandangan *peasant* yang fatalistik ini menganggap bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh nasib atau faktor keberuntungan, dan tidak dipikirkan sebagai produk hubungan sebab-akibat atau produk dari inisiatif individu (Levi, Reil-Dolmatoff, Sariola, dalam E.M. Rogers, 1966).

7. *Limited aspiration*, rendahnya tingkat aspirasi di kalangan komunitas *peasant* berkaitan erat dengan sikap fatalis dan paham “bahwa segala sesuatu di dunia ini terbatas”. Aspirasi dalam hal ini merupakan keadaan-keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Sosiolog membuktikan rendahnya aspirasi di kalangan *peasant* lewat kenyataan bahwa kalangan *peasant* di desa-desa Amerika Selatan kurang lazim menyebut kata “*masa depan*” (*future*). Salah satu yang menyebabkan rendahnya aspirasi di kalangan *peasant* ini adalah kurangnya kesempatan yang mereka miliki. Lebih jauh Niehoff (dalam E.M. Rogers, 1969), mengungkapkan apabila kurangnya kesempatan ini disebabkan karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh para elit penguasa. Dengan demikian rendahnya aspirasi ini menyebabkan rendahnya motivasi dan keinginan untuk meraih prestasi (*achievement motivation*).
8. *Lack of deferred gratification*. Rendahnya tingkat aspirasi dan sikap fatalistik yang melekat di kalangan komunitas *peasant* membuat mereka kurang terbiasa untuk menanggukuhkan kepuasan (*lack of deferred gratification*) serta tidak ada nya rasa untuk menahan diri, yaitu mengorbankan kenikmatan saat ini, untuk meraih keuntungan yang lebih besar di masa depan. Lebih lanjut seperti yang di ungkapkan oleh Foster berkaitan dengan studinya terhadap orang-orang desa Mexico (dalam E.M. Rogers, 1969) “*jika mempunyai uang, mereka menggunakannya, jika tidak mereka berharap dapat meminjam*”.
9. *Limited view of the world*. Pandangan yang sempit dari komunitas *peasant* ini disebabkan karena pandangan mereka terbentuk oleh keadaan “sekarang” serta keadaan lingkungan sosial yang terbatas. Pandangan yang sempit dan terbatas ini berkaitan dengan sifat kelokalan (*localiteness*) dan kurangnya perspektif waktu yang mereka miliki. Kelokalan merupakan suatu derajat

paham yang membuat orientasi masyarakat lebih cenderung ke dalam daripada keluar dari sistem sosial mereka. *Cosmopolitaness* merupakan lawan dari sikap kelokalan. Sifat kelokalan (*localiteness*) di kalangan peasant itu sendiri adalah akibat dari rendahnya mobilitas geografis (fisik) dan kurangnya keterlibatan mereka di media massa. E.M. Rogers menggambarkan bahwa *peasant* ini tidak memiliki kepastian dan ketepatan waktu.

10. *Low empathy*. Komunitas peasant cenderung memiliki *emphaty* yang rendah, dalam artian petani memiliki keterampilan yang rendah di dalam “menangkap” peran orang lain di dalam dirinya (Rogers, 1969 dalam Wirawan). Derajat *emphaty* yang rendah di kalangan peasant ini di artikan sebagai rendahnya kemampuan seorang peasant untuk memproyeksikan dirinya ke dalam peranan orang lain. Pada umumnya peasant tidak mampu untuk memproyeksikan diri mereka secara lain atau berbeda daripada keadaan yang secara jelas nyata mereka alami. Ketidakmampuan mereka “menangkap” peran orang lain di dalam diri peasant itu disebabkan karena pengenalan yang terbatas terhadap cara dan pola hidup lain serta jarak sosial-psikologis yang jauh antara mereka dengan elite perkotaan. Rendahnya empati di kalangan peasant menyebabkan mereka sulit untuk menerima pengaruh-pengaruh dari luar (pembaharuan).

Meskipun Rogers merumuskan ke 10 karakteristik petani itu berdasarkan hasil studinya Colombia, akan tetapi selain perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya, sesungguhnya banyak pula persamaannya dengan ciri-ciri petani di Indonesia, khususnya di Jawa. Kesepuluh karakteristik petani tersebut saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem budaya. Kerangka pemikiran Emile Durkheim dalam karyanya *Division of Labour in Society* (1964) sistem budaya *peasants* tergolong tipe solidaritas mekanis. Masyarakat

tersebut memiliki pandangan, kepercayaan, dan gaya hidup yang sama, sehingga cenderung homogen.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang “Keterikatan Sosial pada Masyarakat Korban Bencana (Studi pada Masyarakat Korban Bencana Tanah Longsor Desa Banaran Ponorogo) ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data yang bersifat Deskriptif dengan pendekatan Interpretatif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti(Wanda,2018). Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengkaji masalah ini dengan alasan karena peneliti ingin memahami secara rinci dan mendalam kaitannya dengan respon masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran terhadap kebijakan relokasi serta solidaritas sosial yang ada pada masyarakat korban bencana tanah longsor desa Banaran Ponorogo serta untuk menggambarkan dan menginterpretasi secara utuh dinamika sosial tersebut sesuai dengan kenyataan (apa yang sebenarnya) tanpa membuatnya sederhana kedalam bentuk variabel-variabel.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma definisi sosial untuk mendeskripsikan secara kualitatif tentang keterikatan sosial pada masyarakat korban bencana. Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran serta bagaimana solidaritas sosial pada masyarakat korban bencana tanah longsor desa Banaran. Menurut Denzin dan Lincoln (1994 dalam wanda 2018) definisi dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode seperti proses interpretasi, dan pendekatan naturalistik terhadap subjek penelitian (*subjek matter*).

Dalam tipe penelitian kualitatif, ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, melainkan memberi penekanan bahwa pemahaman terhadap penelitian dibentuk oleh beberapa hal, antara lain; personal history, biografi, gender, kelas, sosial, etnisitas, ras dan orang-orang yang berada dalam setting sosial sekitar. (Denzin dan Lincoln, 2000). Penelitian kualitatif dianggap dapat menyajikan secara lebih mendalam terhadap hasil yang diperoleh mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengalaman individu, kepercayaan dan sikap individu tersebut dalam memandang sesuatu.

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik sebab penelitian yang dilakukan bersifat alami atau dilakukan pada kondisi yang alamiah (*normal setting*). Di sisi lain metode kualitatif juga disebut sebagai metode etnografi, karena awalnya metode penelitian ini banyak digunakan pada penelitian di bidang antropologi budaya (Sugiyono, 2005 dalam Bryan 2015). Penelitian kualitatif pada dasarnya selalu melibatkan studi dan pengumpulan data secara empiris melalui studi kasus, pengalaman pribadi (*personal*), kisah hidup (*life story*), wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, interaksi, sejarah, dan teks-visual yang mendeskripsikan secara rutin terkait dengan kehidupan subjek penelitian (Emzir, 2010 dalam Wanda 2018).

Ciri-ciri penelitian kualitatif terbagi menjadi lima. Ciri pertama, studi penelitian bersifat alamiah atau naturalistik. Peneliti berupaya terjun langsung ke lapangan ke dalam lingkungan asli subjek penelitian, atau bisa juga dengan menggunakan alat bantu seperti video perekam atau alat perekam lainnya. Ciri kedua adalah data penelitian bersifat deskriptif. Yang mana data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara (transkrip), catatan lapangan, alat perekam, dokumen-dokumen pribadi.

Ciri ketiga dari penelitian kualitatif yaitu pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Proses disini adalah keruntutan dan sistematisasi peneliti dalam menjalani penelitian, dimulai dari

menemukan suatu masalah tertentu, menyusun kajian teori dan perspektif teori, merancang metode penelitian beserta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur (Emzir, 2010 dalam Wanda 2018). Selanjutnya ciri keempat dari penelitian kualitatif adalah teknik analisis data yang dilakukan secara induktif. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif bukan membatasi penelitian dengan cara menerima atau menolak hipotesis penelitian, melainkan adanya sikap dari peneliti untuk belajar mengerti situasi yang terjadi. Kemudian ciri kelima dari penelitian kualitatif adalah makna yang berasal dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti berupaya menghargai perspektif subjek penelitian dalam memaknai kehidupan mereka masing-masing.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan gambaran secara detail mengenai situasi sosial secara spesifik (Neuman, 2007 dalam Wanda 2018). Pendekatan ini berusaha untuk memberikan deskripsi secara akurat serta memberikan hasil yang detail. Juga dapat menyajikan gambaran dari tipe manusia atau mengenai aktivitas sosial.

1.7.2 Isu – isu Penelitian

Penelitian ini membahas “Keterikatan Sosial pada Masyarakat Korban Bencana (Studi pada Masyarakat Korban Bencana Tanah Longsor Desa Banaran Ponorogo). Oleh karena itu, terdapat beberapa isu dalam penelitian ini yaitu :

a. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial merupakan adanya rasa saling percaya, rasa kesetiakawanan, dan rasa senasib sepenanggungan antar individu dalam suatu kelompok sosial yang dikarenakan adanya perasaan emosional dan moral yang dianut bersama dimana hal itu dapat membuat individu merasa nyaman dengan kelompok sosial tersebut. Solidaritas sosial selalu mengarah pada keakraban atau

kekompakan dalam suatu kelompok sosial.

b. Masyarakat

Masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *society* merupakan suatu kelompok sosial yang di dalamnya terdapat satu kesatuan individu yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya kontinyu, serta terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

c. Bencana Alam

Bencana alam merupakan situasi sosial atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup orang-orang yang sedang tertimpa peristiwa tersebut. Bencana yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam yang tentunya membawa banyak sekali penderitaan, mulai dari kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, harta benda, kerusakan lingkungan dan menimbulkan rasa trauma bagi para korbannya. Bencana alam dapat terjadi karena tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dll.

d. Tanah longsor

Tanah longsor terjadi karena 2 faktor utama, yaitu faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, litologi, sesar dan kekar pada batuan. Faktor pemicu merupakan faktor yang mengakibatkan bergerakaknya material tersebut seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng dan aktivitas manusia (Naryanto, 2013 dalam Wanda 2018).

e. Relokasi

Relokasi merupakan permukiman kembali pasca terjadinya sebuah bencana alam, dimana lingkungan yang mengalami

kerusakan akibat bencana dibangun kembali di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda untuk menghindari resiko bencana. Relokasi penduduk yang terdampak bencana merupakan salah satu kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya ancaman bencana lama, bahkan menjadi solusi yang populer dalam pengelolaan bencana (Whiteford dan Tobin, 2004 dalam Fanni 2014).

1.7.3 Setting Sosial

Setting sosial yang telah ditentukan untuk menggali informasi terkait nilai-nilai solidaritas pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor dalam responnya terhadap kebijakan relokasi adalah di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dimana kawasan tersebut pernah terjadi bencana alam tanah longsor pada tanggal 1 April 2017. Observasi dilakukan pertama kali pada hari Minggu, 11 November 2018 dan observasi kedua dilakukan hari Sabtu, 1 Desember 2018, kemudian untuk pengambilan data selanjutnya dilakukan pada Sabtu, 15 Desember 2018 hingga selesai. Mengingat bahwa dalam penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menggeneralisasikan hasil penelitian, akan tetapi ingin mengungkap sesuatu gejala yang unik di masyarakat.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena belum banyak yang melakukan studi di tempat tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

1.7.4 Metode Penentuan Informan Penelitian

Keberadaan informan sangat penting dalam menunjang suatu penelitian, dimana informan merupakan narasumber yang akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Informan pada penelitian ini yaitu masyarakat korban bencana alam tanah longsor di Desa

Banaran. Dalam penelitian ini , peneliti mendapatkan informan 7 orang dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan mengambil informan hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara sengaja, *purposive*.

Alasan peneliti memilih teknik penelitian tersebut adalah karena informan yang dipilih sebagai narasumber informasi hanyalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain tidak semua orang bisa berpotensi untuk dijadikan informan guna menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan, maka dari itu informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Informan-informan yang telah didapatkan peneliti kemudian dijadikan informan subyek dan non subyek di dalam penelitian ini.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan mendasari pemilihan informan antara lain, yaitu: *pertama*, informan harus memiliki waktu luang untuk pewawancara; *kedua*, informan memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menceritakan pengalaman mereka baik di masa lalu maupun masa kini dalam bentuk narasi; *ketiga*, informan adalah termasuk “jenis” orang yang menarik perhatian peneliti (Bogdan dan Taylor, 1992).

Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel untuk kasus tertentu dengan tujuan khusus (Neuman, 2007 dalam Wanda 2018). Teknik ini digunakan untuk kasus yang unik dan informatif. Lebih jauh, Neuman menjelaskan bahwa teknik *purposive* dapat digunakan dalam situasi khusus, diantaranya adalah: *pertama*, teknik *purposive* dapat digunakan oleh peneliti untuk memilih informan yang unik serta dapat memberikan informasi yang bersifat khusus, dimana

dalam hal ini tentunya yang berkaitan erat dengan fokus penelitian yang dikaji; *kedua*, teknik *purposive* digunakan oleh peneliti untuk memilih atau menentukan informan yang cenderung sulit untuk dicari dan merupakan populasi khusus (*specialized population*); *ketiga*, teknik *purposive* digunakan ketika peneliti ingin mengidentifikasi tipe-tipe khusus dari suatu permasalahan untuk mendapatkan investigasi atau wawancara mendalam (Neuman, 2000 dalam Wanda 2018).

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan konstruk atau teori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Informan harus memiliki informasi penting yang terkait dengan permasalahan dan topik dalam penelitian ini. Kriteria informan adalah orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan masyarakat korban bencana alam yang terdampak langsung maupun tidak langsung bencana longsor di desa Banaran, kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1.1

Daftar Informan

No.	Keterangan Informan	Inisial	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Subyek	SU	Perempuan	Petani
2	Subyek	SI	Perempuan	Buruh tani
3	Subyek	IS	Perempuan	Petani
4	Subyek	TK	Perempuan	Petani
5	Subyek	JM	Perempuan	Buruh tani

6	Subyek	KM	Laki-laki	Perangkat Desa
7	Non subyek	SA	Laki-laki	Kepala Desa

1.7.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) yang mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang mana di dalamnya terdapat petunjuk secara garis besar mengenai proses dan isi wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan observasi, dan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Interview merupakan cara untuk memperoleh data di lapangan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, dimana peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara lebih terarah pada fokus penelitian (Lexy, 2001). Menurut Poerwandari (2013, dalam Wanda 2018) wawancara merupakan proses tanya jawab berupa percakapan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui makna-makna subjektif yang dipahami oleh subjek terkait dengan fokus maupun topik penelitian, dan bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut (Banister dkk., 1994, Poerwandari, 2013 dalam Wanda 2018).

Dalam proses wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara yang umum dengan mencantumkan isu-isu yang ingin digali tanpa harus mengurutkan pertanyaan (Poerwandari, 2013 dalam Wanda 2018). Pedoman wawancara digunakan agar peneliti ingat

mengenai aspek-aspek yang harus digali. Fungsi dari pedoman wawancara itu sendiri tidak lain adalah untuk menjaga agar keseluruhan wawancara tetap berfokus pada permasalahan dan topik yang dikaji dalam penelitian.

Wawancara mendalam atau *Indepth interview* merupakan salah satu bentuk teknik wawancara yang sifatnya informal, yang mana tidak mengharuskan peneliti untuk menggunakan pedoman wawancara dalam mendapatkan informasi, akan tetapi peneliti melakukan keterlibatan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh informan penelitian. Peneliti beradaptasi dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh informan agar informan yang berperan sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dalam memberikan segala informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti juga dapat mengamati bagaimana interaksi sosial yang berlangsung dan kondisi lingkungan informan penelitian. Peneliti pada tahap ini memberikan pertanyaan secara spontan tanpa arahan dan pedoman tertentu. Dalam proses pengumpulan data penelitian, wawancara mendalam atau *indepth interview* ini menjadi bagian yang amat penting sebab hasil informasi secara mendalam didapat dari tahap ini.

Dalam proses wawancara mendalam, langkah pertama yang dilakukan yakni proses *getting in* yang dilakukan pada saat penelitian belum dimulai. Kemudian peneliti mendatangi rumah informan guna memperkenalkan diri dan menjelaskan secara rinci mengenai maksud dan tujuan peneliti, pada tahap ini, peneliti menjalin kedekatan relasi untuk membangun kepercayaan informan terhadap peneliti, sehingga informan dapat secara leluasa memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses *getting along* yang mana pada tahap ini peneliti melakukan observasi pada saat penelitian sedang berlangsung. Yang terakhir adalah tahap *getting out* yang dilakukan setelah penelitian berlangsung. Peneliti memilih teknik

wawancara mendalam atau *indepth interview* dalam penelitian ini sebab peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana keterikatan sosial pada masyarakat korban bencana alam tanah longsor desa Banaran.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap kehidupan sehari-hari informan penelitian. Tahap ini bisa dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya proses wawancara mendalam. Dimana peneliti dapat mengamati kondisi dan tingkah laku informan. Saat melakukan observasi peneliti juga bisa mengamati bagaimana kondisi lingkungan sekitar informan penelitian dengan kesesuaian fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan pada saat wawancara mendalam atau *indepth interview* bersama informan. Kemudian dilakukan juga dokumentasi diluar kegiatan wawancara. Dokumentasi dari kondisi lapangan saat itu, kemudian dokumentasi dari segi kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat juga diperlukan dalam penelitian kali

1.7.6 Metode Analisis Data

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data, wawancara mendalam atau *indepth interview* beserta hasil dari observasi dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dilakukan tahapan analisis yang meliputi :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pengklarifikasian, atau transparansi data yang telah diperoleh di lapangan melalui proses wawancara mendalam dan observasi kepada informan subyek maupun non subyek. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang meliputi pengkerucutan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu

serta pengorganisasian data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan susunan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, dapat dilihat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa matriks, grafik, jaringan dan skema ataupun bagan. Semua dirancang sedemikian rupa untuk menggabungkan informasi yang tersusun pada suatu bentuk yang padu padan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis yang terakhir. Pada saat kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti dalam penelitian kualitatif mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Pada tahap ini peneliti bisa menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.